

BAB III

3.1. Jepang dan Reinterpretasi Pasal 9: *War on terror* atau Usaha Eksistensi Jepang?

Terorisme bukan merupakan hal baru yang dialami oleh masyarakat dunia, bahkan di Asia Tenggara. *War on terror*, atau sering disebut *worldwide war on terrorism* merupakan satu hal yang digagas oleh Pemerintah Amerika Serikat dibawah Presiden George W. Bush pasca terjadinya serangan terror ke WTC pada 11 September 2001. Beberapa waktu kemudian Presiden Bush mengatakan bahwa musuh yang sebenarnya adalah jaringan radikal dan setiap pemerintahan yang mendukung aksi ini. Istilah jaringan radikal ini pertama kali ditujukan kepada al-Qaeda. Di Asia Tenggara, terorisme bukan merupakan hal yang baru. Peristiwa Bom Bali I menjadi salah satu titik balik dalam memerangi teroris dan menangkal aksi yang dilakukan oleh jaringan mereka. Jika pada masa lalu teroris selalu dikaitkan dengan al-Qaeda, saat ini setiap aksi teror dikaitkan kepada satu organisasi radikal besar yaitu *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) atau dikenal juga dengan *Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL). ISIS seakan-akan berhasil memberikan satu ketakutan besar pada masyarakat dunia dengan berbagai fasilitas lengkap yang mereka miliki. Perencanaan, pendanaan, dan sistem organisasi yang terstruktur juga menjadi bukti bahwa ISIS merupakan salah satu musuh utama dunia dalam memerangi aksi terorisme untuk membubarkan organisasi radikal seperti ini.

Pada Mei 2018, Amerika Serikat kembali menegaskan perang terhadap terorisme dengan meluncurkan operasi militer untuk memberantas basis pertahanan ISIS di Suriah yang jika dapat dihancurkan mereka katakan sebagai akhir dari segala aksi teror ISIS. Dengan dilakukannya hal ini, hal yang positif yaitu kemenangan atas ISIS sudah cukup dekat, namun tidak demikian. ISIS atau suatu organisasi pecahan

dari ISIS mungkin saja kembali ke Irak dan Suriah untuk mengembalikan kejayaan kekhalifahan ISIS di wilayah itu.

3.1.1. *War on terror* Amerika Serikat dan Kehadiran *The National Defense Program Guidelines* (NDPG) Baru

Hal yang sangat menarik adalah adanya dinamika hubungan internasional yang kini diwarnai oleh terorisme. Setelah serangan teroris pada 11 September 2001 atau yang lebih dikenal dengan peristiwa 9/11, Pemerintahan Bush mendeklarasikan apa yang disebut *war on terrorism* atau sering disebut WOT, yang melibatkan operasi militer yang terbuka dan bebas, usaha untuk memotong arus pendanaan terorisme dan juga pengiriman pasukan ke regional lain seperti yang kemudian ia lakukan di Iraq dan Afghanistan. Beberapa negara kemudian mengikuti dan mendukung langkah Amerika Serikat dalam memberantas terorisme bahkan ada beberapa negara yang ikut menerjunkan pasukannya untuk berpartisipasi dalam *war on terrorism* yang digagas AS ini. Namun dikemudian hari beberapa ahli mengkritik bahwa *war on terrorism* merupakan satu ideologi yang menekankan pada penyebaran rasa takut dan penekanan yang justru akan menambah musuh dan justru secara langsung menyetujui penggunaan kekerasan dibandingkan memetakan satu aksi teror secara lengkap dan meningkatkan keamanan suatu negara.

Jepang sebagai negara yang tergantung pada sistem keamanan dan pertahanan AS, merespon *war on terrorism* AS tersebut dengan memberikan dukungan finansial dan pasukan SDF-nya ke Afganistan dan Irak. Dukungan tersebut dilandasi oleh undang-undang anti-terorisme sebagai landasan hukum Jepang untuk terlibat dalam misi perdamaian. Dukungan tersebut tak lepas dari adanya persepsi ancaman dari gerakan dan kelompok teroris

terhadap wilayah kedaulatan dan integritas Jepang. Terlebih secara geopolitik, Jepang sangat rawan terhadap serangan teroris. Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa perubahan-perubahan dalam bidang pertahanan terus terjadi di Jepang. Perubahan kebijakan yang penting yang kemudian menjadi titik balik bagi Jepang ada di tahun 2007 ketika Parlemen Jepang secara resmi mengubah Badan Pertahanan menjadi Departemen Pertahanan yang setara dengan satu kementerian tunggal.

Penggantian Badan Pertahanan menjadi Departemen Pertahanan dilakukan dalam rangka meningkatkan status pertahanan yang dimiliki Jepang sebelumnya. Dengan hal ini maka dalam segi pertahanan, Jepang akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar karena memiliki hak untuk menentukan dan merancang anggaran pertahanan sendiri dan juga dapat mengajukan rancangan undang-undang. Anggaran ini dapat dialokasikan dalam rangka peningkatan kekuatan militer seperti jumlah pasukan, penambahan armada kapal perang, dan penambahan atau peremajaan pesawat tempur. Tidak hanya itu Departemen Pertahanan juga memiliki hak penuh dalam menentukan kebijakan pertahanan. Peningkatan status Badan Pertahanan menjadi Departemen Pertahanan ini secara tidak langsung dapat dilihat adanya satu niat Jepang untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam menangkal ancaman keamanan di kawasan, terutama dari Korea Utara dan peningkatan kemampuan militer Tiongkok.

Tahun 2010 juga menjadi satu titik balik bagi Jepang untuk mereinterpretasi Pasal 9. Dipengaruhi oleh situasi keamanan regional seperti peningkatan militer Tiongkok dan ancaman nuklir dan rudal dari Korea Utara, perubahan kebijakan ini menjadi satu opsi yang dapat dipilih dari faktor tersebut. Jepang meluncurkan suatu kebijakan pertahanan baru dalam bentuk *The National*

Defense Program Guidelines (NDPG) pada bulan Desember 2010. NDPG yang dikeluarkan di tahun 2010 ini melengkapi NDPG yang sudah ada sebelumnya yang merupakan satu perubahan besar dari NDPG terdahulu pasca-Perang Dunia II yang menggantikan konsep pasifisme menjadi konsep pertahanan yang lebih dinamis dan lebih bebas yang menuntut Jepang untuk lebih proaktif dalam memainkan peranan internasionalnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Dengan kehadiran NDPG ini akan merangkul kebijakan pertahanan Jepang yang lebih aktif. Disamping itu sejalan dengan keaktifan pertahanan ini, NDPG baru menetapkan bahwa Jepang akan terus meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pertahanan dengan cara bekerjasama dengan Amerika Serikat dan juga meningkatkan kemampuan militer Jepang sebagai satu opsi atau cara atas suatu keadaan kawasan yang dapat dikatakan mengancam Jepang. Saat ini pula, Jepang mengalihkan fokus pertahanan dari utara (Korea Utara dan Korea Selatan) ke barat daya dimana Jepang berbagi perbatasan maritim dengan Tiongkok. Hal ini semakin membuktikan bahwa keamanan regional menjadi salah satu hal yang dianggap sebagai ancaman tersendiri bagi Jepang hingga mereka mengubah kebijakan pertahanan dengan memperkuat militer mereka agar setara dengan negara di kawasan Asia Timur.

3.1.2. Titik Balik *War on Terror* Jepang

Pada 20 Maret 1995, Jepang mengalami serangan teroris terburuk dalam sejarahnya ketika sekelompok eksrimis religius menyerang sistem transportasi kereta bawah tanah Tokyo. Grup ini

bernama Aum Shinrikyo¹, yang kemudian melancarkan lima serangan yang terstruktur dan terkoordinasi dengan menggunakan gas sarin yang melukai sejumlah pengguna kereta bawah tanah dan menewaskan 12 orang. Kemudian pada Oktober 2003, Osama bin Laden mengirimkan ancaman bagi seluruh negara yang berpartisipasi dalam operasi militer di Iraq. Pada saat itu, JSDF juga dikirimkan ke Iraq dalam kondisi khusus yang melarang mereka untuk berperan dalam peperangan. Bin Laden mengatakan bahwa negara-negara ini, termasuk Jepang yang juga disebutkan olehnya, akan mengalami serangan balasan dari al-Qaeda pada saat dan pada tempat yang tepat. Kemudian, beberapa serangan dilakukan ke warga negara Jepang di Iraq. Pada November 2003, dua aparat pemerintahan Jepang dibunuh di selatan Kota Tikrit. Pada Mei 2004, dua jurnalis asal Jepang dibunuh.

Pada Agustus 2014, Haruna Yukawa, seorang yang merupakan jurnalis sekaligus dokter diculik dan ditawan di pinggiran Kota Aleppo. Pada Oktober 2014, Kenji Goto, seorang jurnalis lepas, diculik di Raqqa. Kemudian pada 20 Januari 2015, ISIS merilis video ancaman untuk mengeksekusi dua warga negara Jepang yang menjadi tahanan mereka yaitu Haruna Yakawa dan Kenji Goto. Permintaan ISIS adalah \$100 juta untuk masing-masing orang. Aksi ini adalah reaksi mereka atas kebijakan Jepang yang berkomitmen untuk menyumbang \$200 juta dalam bentuk bantuan non-militer pada negara-negara yang melawan ISIS. Karena batas waktu atas permintaannya sudah terlewati, ISIS kemudian mengeksekusi kedua orang ini. Hal ini menimbulkan kecaman dan kemarahan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang

¹ Aum Shinrikyo adalah salah satu aliran sesat yang menggabungkan berbagai ajaran agama yang didirikan oleh Shoko Asahara pada 1984. Mereka mengklaim bahwa mereka merupakan agama bagi kaum elit.

tetap kukuh dan berjanji untuk melawan terorisme tanpa rasa ampun.

3.1.3. Hadirnya ISIS di Asia Tenggara:

Hadirnya kelompok Abu Sayyaf dan Maute di Filipina membuat kekhawatiran baru bagi sebagian besar Negara-negara di Asia termasuk Jepang, Indonesia, dan Malaysia. Abu Sayyaf merupakan suatu gerakan yang bersifat radikal yang mengikuti doktrin Wahhabi. Kelompok ini selalu menggunakan kekerasan disetiap aksinya seperti penculikan untuk mendapatkan uang tebusan, berbagai aksi pemboman, dan penyiksaan telah dilakukan oleh kelompok ini. Keberadaan kelompok ini membuat resah warga yang tinggal di Pulau Jolo dan Basilian di Filipina Selatan. Sedangkan Maute adalah suatu kelompok Islam radikal yang merupakan mantan pejuang Moro National Liberation Front (MNLF) -yang menginginkan kemerdekaan Filipina Selatan dan mendirikan Negara Filipina Selatan berdasarkan Syariat Islam- dan pejuang-pejuang asing yang direkrut dan dipimpin oleh Abdullah Maute, yang merupakan pendiri Dawlah Islamiya atau terafiliasi ISIS yang mendiami Lanao del Sur, Mindanao, Filipina. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama merupakan organisasi yang melepaskan diri dari MILF karena tidak setuju dengan visi MNLF yang pada akhirnya mau bekerja sama dengan pemerintah pasca munculnya *Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM)*².

Saat ini, MNLF sendiri membantu pemerintah dalam melawan Maute, Abu Sayyaf, dan *Bangsamoro Islamic Freedom*

² *Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM)* merupakan sebuah kebijakan otonomi khusus yang diberikan Pemerintah Filipina dimana masyarakat Muslim dapat membentuk hukumnya sendiri di wilayah ini.

Fighters. Salah satu yang menjadi kekhawatiran kawasan adalah adanya *Battle of Marawi*³ di Marawi, Lanao de Sur, Filipina. Menurut Pemerintah Filipina, konflik ini dimulai ketika angkatan bersenjata berusaha menangkap Isnilon Hapilon -pemimpin Abu Sayyaf- setelah menerima informasi bahwa ia berada di kota ini untuk bertemu Kelompok Maute. Konflik bersenjata dimulai ketika para anak buah Hapilon melakukan tembakan ke angkatan bersenjata Filipina yang kemudian menyerang Camp Ranao dan menempati beberapa bangunan di kota itu termasuk Universitas Negeri Mindanao, sebuah rumah sakit dan Balaikota Marawi.

Konflik ini secara resmi baru berakhir setelah kematian Omar Maute dan Isnilon Hapilon. Pada 17 Oktober 2017, Presiden Duterte menyatakan bahwa Marawi bebas dari terorisme dan dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana beberapa hari kemudian. Dengan ini konflik ini benar-benar berakhir, namun semua pihak harus tetap berjaga-jaga dan bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti kedua kelompok ini kembali melancarkan serangannya kembali. Setelah peristiwa ini, Jepang lewat PM Shinzo Abe berusaha untuk menawarkan bantuan restrukturisasi kota akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh *Battle of Marawi* yang menewaskan ribuan kombatan dan warga sipil.

³ Battle of Marawi merupakan konflik bersenjata ini terjadi selama lima bulan di Marawi, yang dimulai 23 Mei 2017, antara angkatan bersenjata Filipina dibantu MNLF melawan militan yang terafiliasi Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), termasuk kelompok Maute dan Abu Sayyaf.

3.2. Ancaman: Berkembangnya Tiongkok dan Ancaman Nuklir Korea Utara

3.2.1. Berkembangnya Tiongkok Menjadi Aktor Penting Politik Internasional: Ancaman atau Anugerah bagi Jepang?

Sejak 1949, menurut World Bank, Tiongkok berhasil mengeluarkan 800 juta orang dari kemiskinan sejak adanya reformasi ekonomi pada 1978. Pada 2015 Tiongkok berhasil untuk meraih seluruh Rencana Pembangunan Millenium PBB dan mereka memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ekonomi dunia sejak krisis finansial 2008. Tidak lupa juga Tiongkok juga telah melatih jutaan orang untuk menulis dan membaca, serta membangun infrastruktur moden seperti jalan dan kereta cepat.

Perkembangan yang dialami oleh Tiongkok saat ini dapat dikatakan sama dengan di Amerika Serikat atau bahkan dalam waktu yang akan datang dapat melampaui Amerika Serikat dengan program *silk belts and roads*⁴ yang mereka gagas untuk menghubungkan arus perdagangan antara Asia dan Eropa.

Peningkatan militer Tiongkok menjadi dilema tersendiri bagi Jepang. Selama beberapa dekade Jepang telah menaruh perhatian pada perkembangan militer Tiongkok terlebih lagi di tahun 2010 kekhawatiran Jepang semakin meningkat. Hal ini dikarenakan setelah peristiwa bentrokan nelayan Tiongkok dan penjaga pantai Jepang di Pulau Senkaku (Grant, 2012). Peningkatan militer Tiongkok mulai berkembang saat ekonomi Tiongkok telah maju, perkembangan ekonomi Tiongkok ini telah di mulai sejak tahun 1970-an. Peningkatan kekuatan militer

⁴ Belt and Road Initiatives adalah satu terobosan yang dikeluarkan oleh Tiongkok untuk memperlancar arus barang antara 71 negara yang menguasai hampir setengah populasi dunia dan seperempat dari GDP Dunia. Hal ini dilakukan karena adanya perlambatan perkembangan ekonomi yang dialami Tiongkok beberapa waktu ini.

Tiongkok dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah kapabilitas militer baik darat, laut dan udara.

Menurut Global Firepower⁵, pada 2018 ini Tiongkok memiliki jumlah tentara sebanyak 2.693.000 personel dimana 2.183.000 merupakan tentara aktif dan 510.000 merupakan tentara cadangan. Sementara itu terdapat 750.000.000 orang yang bisa dipersiapkan untuk menjadi tentara jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dalam sisi pertahanan darat Tiongkok memiliki kendaraan tempur sejumlah 9.000 orang, tank sejumlah 7.716, dan 10.296 artileri. Dari sisi pertahanan laut, Tiongkok memiliki Kapal perang berjumlah 714 kapal yang terdiri dari 1 kapal induk bernama Liaoning, 50 kapal kelas *frigates*, 29 kapal kelas perusak (*destroyer*), 39 kapal kelas *corvettes*, 73 kapal selam, 220 kapal patroli, dan juga 29 kapal penyapu ranjau. Untuk pertahanan udara Tiongkok mempunyai jumlah pesawat 3.035 unit yang terdiri dari 1.125 pesawat *fighter*, 1.527 pesawat serang, 722 pesawat angkut, 353 pesawat latihan, 985 helikopter yang 281 diantaranya merupakan helikopter tempur. Dalam segi anggaran pertahanan Tiongkok mengalokasikan \$151.000.000.000 untuk pertahanannya.

Angka diatas jauh lebih besar jika kita bandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Jepang. Anggaran pertahanan Jepang hanya \$44.000.000.000, jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Tiongkok. Dalam segi pertahanannya, di darat, Jepang memiliki total 310.457 tentara yang terdiri dari 247.157 tentara aktif, dan 63.300 personel cadangan. Terdapat 54.000.000 orang yang dapat dipersiapkan untuk bertempur. Dalam pertahanan darat, Jepang memiliki tank dengan jumlah 679 unit, 3.178 kendaraan tempur, dan 801 artileri. Dari sisi pertahanan laut, Tiongkok memiliki

⁵ Global Firepower merupakan suatu laman yang menyediakan semua rincian data militer secara detail dengan data yang cukup akurat pada hampir semua negara di dunia.

Kapal perang berjumlah 131 kapal yang terdiri dari 4 kapal induk, 36 kapal kelas *destroyer*, 6 *corvettes*, 17 kapal selam, 6 kapal patroli, dan juga 25 kapal penyapu ranjau. Untuk pertahanan udara Tiongkok mempunyai jumlah pesawat 1.508 unit yang terdiri dari 290 pesawat *fighter*, 290 pesawat serang, 486 pesawat angkut, 404 pesawat latih, 622 helikopter dimana 84 diantaranya merupakan helikopter tempur.

Selain itu baru-baru ini juga Tiongkok tengah membangun kapal induk keduanya dan telah memiliki kapal induk pertama lengkap dengan pesawatnya yang merupakan Kuznetsov class bekas Uni Soviet, yang diperbaharui, diremajakan dan dinamakan Liaoning. Tidak lupa bahwa Tiongkok telah berhasil membuat pesawat silumannya sendiri yaitu Chengdu J-20 yang diklaim memiliki kemampuan seperti pesawat generasi ke-5 buatan Amerika Serikat, F-22 Raptor. Saat ini, Tiongkok sedang melakukan percobaan untuk pesawat yang dikhususkan untuk *electronic warfare*⁶ –untuk menyaingi Boeing/Lockheed-Martin EA-18G Growler buatan AS- yaitu Shenyang J-16D yang berbasis Shenyang J-11BS yang merupakan produk lisensi buatan Tiongkok yang dibuat dan dikembangkan dari pesawat tempur milik Rusia, Sukhoi Su-30MKK.

Sebenarnya peningkatan ekonomi Tiongkok bukanlah merupakan hal yang baru bagi Jepang, karena Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong pertumbuhan ekonominya juga meningkat. Namun peningkatan ekonomi yang disertai peningkatan militer Tiongkok ini yang menjadi dilemma tersendiri bagi Jepang. Selain

⁶ *Electronic warfare* atau peperangan elektronik adalah sebuah konsep peperangan modern yang menggunakan sistem intervensi elektronik berbentuk gelombang elektromagnetik terhadap sistem yang dimiliki lawan. Hal-hal yang dapat diintervensi antara lain saluran komunikasi, infra merah, dan hingga radar. Cara kerja dari EW adalah dengan melakukan jamming pada sistem yang dimiliki lawan sehingga membuat kacau sistem elektronik dari peralatan yang dimiliki oleh lawan.

itu yang menjadi perhatian besar Jepang adalah pada kasus persengketaan pulau Diaoyu (Senkaku) antara Jepang dan Tiongkok. Jepang dan Tiongkok keduanya sama-sama mengklaim atas pulau tersebut, pulau yang kaya akan suplai energi baru dan laut Cina Timur yang menyimpan potensi gas yang besar.

Alasan peningkatan militer Tiongkok dan persengketaan pulau antara kedua negara mendorong Jepang untuk meningkatkan kekuatan militernya. Konsep *security dilemma* oleh Griffiths & O'Callaghan ini sangat relevan dengan permasalahan peningkatan militer Tiongkok yang menjadi dilema keamanan tersendiri bagi Jepang. Jepang mulai meningkatkan keamanan nasionalnya melalui perubahan kebijakan pertahanan seperti meningkatkan status menjadi Departemen Pertahanan.

Selain itu Hideshi Takesada direktur eksekutif Institut Nasional untuk Studi Pertahanan Jepang mengatakan:

“The Korean Peninsula and North Korea are imminent and concrete threats to Japan, while Tiongkok is more of a medium-term threat”.

(reuters.com)

Dalam pernyataan tersebut Jepang merasa bahwa nuklir dan rudal Korea Utara merupakan prioritas utama dalam penangkalan ancaman serta Tiongkok merupakan ancaman yang dianggap menengah bagi Jepang sehingga hal inilah yang kemudian melahirkan perubahan kebijakan pertahanan di tahun 2010. Kebijakan pertahanan yang lebih dinamis melalui program NDPG yang didalamnya tertuang kerjasama Jepang dengan AS dalam mengembangkan dan meningkatkan sistem pertahanan rudalnya serta juga peningkatan kekuatan militer lainnya.

3.2.2. Korea Utara: *Imminent Threat*

Kim Jong Un, pemimpin yang berpikiran berbeda yang terus menerus mengembangkan nuklir dan rudal persenjataan yang telah membawa kekawatiran dan ancaman dunia setelah Perang Dingin. Keberadaan rudal dan nuklir Korea Utara menjadi ancaman bagi negara-negara di dunia khususnya juga negara di Asia Timur, karena nuklir dan rudal tersebut sangat mengancam keamanan negara-negara sekitarnya termasuk Jepang.

Pemerintah dan masyarakat Jepang merasa terancam dengan adanya nuklir dan rudal dari Korea Utara. Hal ini bermula saat Korea Utara menembakkan uji coba rudal balistik⁷ Taepodong-1 di atas wilayah udara Jepang pada bulan Agustus 1998, dan juga menyatakan kepemilikan senjata nuklir pada tahun 2003 dan kemudian melakukan uji tembak rudal jarak pendek yang dilakukan dipantai timur pada tanggal 1 Mei 2005. Selain itu, Pyongyang dianggap memiliki cukup bahan untuk membuat dua atau tiga bom nuklir dan sekitar lima puluh rudal dan hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi Jepang. Program Rudal balistik Korea Utara ini memiliki kemampuan untuk menyerang Jepang hanya 8,5 menit waktu terbang dari Korea Utara dititik terdekat (Wang, 2008). Jelas hal tersebut sangat mengancam Jepang yang secara geografis berdekatan dengan Korea Utara. Karena jangkauan rudal Korea Utara bisa mencapai seluruh wilayah teritorial Jepang.

⁷ Rudal balistik pertamakali digunakan pada Perang Dunia II oleh Jerman. Rudal ini dapat terbang pada ketinggian sub-orbit balistik sehingga tidak dapat dicapai oleh pesawat-pesawat tempur. Pada era Perang Dingin rudal ini dikenal dengan ICBM yang kemudian diberi dengan nuklir oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet

Selain itu, Korea Utara juga mengabaikan protes dari PBB dan kekuatan lain seperti AS, Jepang dan Tiongkok atas nuklir dan rudalnya. Keberadaan nuklir dan rudal Korea Utara tersebut membuat Jepang lebih memperhatikan keamanan nasionalnya dan hal ini terbukti di tahun 2007, dibawah pemerintahan Shinzo Abe Jepang meng-upgrade status Badan Pertahanan menjadi Departemen Pertahanan dan Keamanan. Peningkatan status menjadi Departemen Pertahanan ini memungkinkan bagi Jepang untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Perubahan kebijakan pertahanan Jepang yang semakin dinamis (NDPG) ditahun 2010 salah satunya dikarenakan keberadaan nuklir dan rudal Korea Utara yang mengancam negaranya dan ditakutkan apabila terjadi sesuatu maka akan berdampak buruk bagi Jepang. Jepang merasa khawatir dan dilema dengan keberadaan rudal tersebut hingga membuat Jepang bekerja sama dengan AS dalam pembuatan rudal dan hal ini dirasa sebagai respon atas nuklir dan rudal Korea Utara.

Walau Kim Jong Un menegaskan komitmen denuklirisasi pada saat ia bertemu dengan Donald Trump di Singapura pada Juni 2018, bukan berarti negara di kawasan yang sama seperti Jepang boleh untuk menganggap hal ini sebagai suatu hal yang menandakan melunaknya Korea Utara di waktu yang akan datang. Jepang tetap harus waspada jika sewaktu-waktu Korea Utara melakukan uji coba rudal nuklir miliknya.

3.3. Meningkatnya Kemampuan Ekonomi, Pengaruh, dan Rasa Nasionalisme Jepang

Peningkatan finansial yang dialami Jepang juga dibuktikan dengan pengakuan dunia bahwa Jepang merupakan salah satu dari negara yang tergabung dalam G20 yang merupakan 20 negara yang memiliki ekonomi

terbesar di dunia dan menandakan bahwa Jepang menjadi salah satu pemain utama dalam perekonomian dunia. Dalam sisi teknologi, Jepang merupakan negara yang cukup maju di Asia selain Korea Selatan.

Meningkatnya kemampuan finansial Jepang merupakan salah satu faktor penting bagi ambisi Jepang untuk menjadi normal state. Peningkatan GDP dari tahun ke tahun membuktikan bahwa Jepang memiliki ekonomi yang stabil dan memiliki pondasi yang kuat dalam menerapkan berbagai kebijakannya terutama dalam bidang militer. Bidang militer memerlukan biaya yang besar dalam sisi operasional dan perawatan. Dengan pondasi ekonomi yang kuat, Jepang yakin untuk meningkatkan kemampuan militernya agar setara dengan negara di kawasan. Anggaran militer Jepang hanya 1% dari GDP negara, namun sudah menduduki peringkat 5 disisi pengeluaran militer setelah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Tiongkok (Riyanto, 2012).

Pencapaian dalam hal kemajuan ekonomi ini telah dilakukan sejak tahun 60-an. Pasca Perang Dunia II Jepang memfokuskan perhatian besar terhadap aktivitas ekonomi dan hal ini dinilai mampu mengangkat kembali perekonomian Jepang yang sempat terpuruk dan menciptakan Jepang yang kuat dengan keberhasilannya di bidang industri, perdagangan serta ekspor-impor. Hasil dari aktivitas ekonomi ini pun kemudian menunjukkan pada perbaikan ekonomi negaranya. Meningkatnya perkonomian Jepang ini membuat Jepang merasa dapat memenuhi kebutuhannya dalam artian mampu untuk membiayai Departemen Pertahanannya yang diikuti dengan pengembangan dan peningkatan kapabilitas militer Jepang. Maka dari itu peningkatan ekonomi Jepang sangat menunjang peningkatan kapabilitas militer Jepang dan juga perubahan kebijakan pertahanan Jepang dalam rangka menuju normal state.

Tahun 2012, Selama dipimpin oleh Shinzo Abe, istilah revitalisasi yang cukup populer yaitu adanya '*Abenomics*', yang didasarkan pada

nama perdana menteri yang sedang menjabat yaitu Shinzo Abe. Tujuan dari Abenomics sendiri yaitu untuk mengatasi resesi yang terjadi dan menurunkan nilai mata uang yen, hal ini dilakukan guna memajukan dan menguatkan kembali perekonomian Jepang. Abenomics terdiri dari 3 langkah kebijakan yaitu:

1. Dana Infrastruktur

Didasarkan pada kebijakan fiskal, dimana Pemerintah Jepang melakukan pemangkasan anggaran kesejahteraan sosial mengingat anggaran sosial ini jumlahnya terbesar dari anggaran yang lainnya, yaitu dengan mencegah atau menekan naiknya biaya kesehatan bagi lansia, perlu diketahui bahwa jumlah usia produktif di Jepang sangat sedikit dibandingkan dengan usia lanjut, sehingga memberi beban pajak yang lebih berat bagi lansia yang kaya.

2. Pelonggaran Moneter

Penurunan nilai mata uang yen, dimana ketika nilai mata uang suatu negara rendah maka bunga dari bank negara tersebut akan rendah. Hal ini dilakukan oleh Jepang, guna menarik para wirausahawan untuk meminjam uang di bank sehingga dapat menggenjot dan mendorong inovasi dari bisnis Jepang sehingga hasil akhirnya Jepang memperoleh pemasukan atau keuntungan.

3. Strategi Tumbuh Berkelanjutan

Karena jumlah usia produktif yang lebih sedikit daripada usia lanjut, memaksa Jepang mempekerjakan dan memberdayakan tenaga perempuan guna meningkatkan perekonomian Jepang. Untuk memaksimalkan tenaga perempuan di Jepang, dilakukan dengan cara membangun tempat-tempat penitipan anak sehingga tidak hanya perempuan lajang saja yang bekerja tetapi juga ibu rumah tangga karir.

3.3.1. Kebangkitan Rasa Nasionalisme di Jepang

Kebangkitan Nasionalisme di Jepang memang sering dikaitkan dengan munculnya Shinzo Abe di Jepang. Nasionalisme juga muncul dikalangan masyarakat. Selain itu terutama kebangkitan nasionalisme dimulai saat keikutsertaan Jepang dalam *Peace Keeping Operations* (PKO)⁸ yang digelar oleh PBB. PKO ini adalah suatu agenda yang dibentuk oleh PBB dalam membantu berbagai konflik di dunia. Krisis Teluk menjadi momen yang sangat penting bagi Jepang dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya berupa pengiriman bantuannya ke luar negeri dalam misi PKO PBB. Kebijakan PKO Jepang merupakan salah satu pijakan dan indikator keinginan Jepang untuk menjadi normal state. Peningkatan rasa nasionalisme juga di tandai oleh keinginan masyarakat mengajarkan jiwa patriotisme di sekolah. Hal ini kemudian semakin menambahkan rasa nasionalisme pada masyarakat Jepang.

Selain itu, peningkatan rasa nasionalisme warga Jepang semakin kuat ketika Jepang dan Tiongkok terlibat konflik dalam perebutan Kepulauan Senkaku. Klaim dari kedua negara ini membuat warga Jepang sangat marah dan murka serta membuat mereka mulai anti dengan Tiongkok. Rasa nasionalisme warga Jepang timbul ketika terjadi pengklaiman atas Kepulauan Senkaku tersebut muncul, yang akhirnya warga Jepang memobilisasi massa atas nama rasa nasionalisme terhadap negaranya yang diganggu negara lain, yaitu Tiongkok. Kasus persengketaan Pulau tersebut semakin meningkatkan rasa nasionalisme penduduk Jepang. Tidak ada seseorang di dunia ini yang suka jika

⁸ Peacekeeping Operation atau sering disebut PKO merupakan bentuk keseriusan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan Internasional. Peran PKO adalah menjaga gencatan senjata dan stabilisasi situasi di lapangan untuk menyelesaikan atau meredam konflik yang terjadi di suatu tempat. PKO dapat diterjunkan pada konflik antara negara dengan kelompok bersenjata, terorisme, serta pencegahan radikalisme.

negaranya di ganggu, apalagi bila ada ancaman dari negara lain atas kedaulatan negaranya. Hal ini kemudian pastinya akan menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dari jiwa mereka untuk membela negaranya, dan hal inilah yang terjadi di negara Jepang.

Semakin meningkatnya rasa nasionalisme di Jepang membuat pemerintah mengambil kebijakan yang memang sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan Jepang demi menjaga integritas wilayahnya. Kebijakan yang diambil Jepang adalah perubahan kebijakan pertahanan Jepang di tahun 2007 dan yang semakin signifikan di tahun 2010 yang mana hal ini akan semakin meningkatkan kapabilitas militer Jepang guna melawan ancaman dari luar. Kebijakan pertahanan Jepang di tahun 2007-2010 juga semakin dinamis dan lebih aktif guna melindungi kedaulatan wilayah dan nasionalisme masyarakatnya yang hal ini juga ditunjang oleh kemampuan ekonomi Jepang.

3.4. Peran Jepang dalam Propaganda *Global War On Terror*

3.4.1. Hubungan antara Jepang-AS dalam *War on Terror* AS

Kedekatan Jepang dan AS terjalin pasca Perang Dunia II setelah Jepang mengaku kalah oleh sekutu dan menjalankan Konstitusi bentukan sekutu yaitu Konstitusi 1947 yang digunakan hingga saat ini. Hubungan kedua negara ini terlihat cukup harmonis karena selama ini Jepang dapat dikatakan menjadi tangan kanan Amerika Serikat di Asia Timur dan selalu mendukung langkah Amerika Serikat dalam *war on terror* yang digagas oleh Amerika Serikat dengan pemberian bantuan berupa dana. Reinterpretasi Pasal 9 akan merubah pola bantuan Jepang dengan menurunkan *Japan Self-Defense Force* (JSDF) tanpa adanya kendala geografis seperti yang menjadi alasan JSDF untuk tidak turun ke medan perang selama ini. Dalam Perang Teluk sendiri, Jepang telah menyumbang \$13 miliar dalam bentuk dana untuk digunakan oleh Amerika Serikat dan sekutu dalam operasi militer

yang dilakukan disana, namun Jepang tidak menurunkan bantuan dalam bentuk pasukan atau bantuan secara peralatan militer karena dilarang dalam Konstitusi 1947.

3.4.2. War on Terror di Asia Tenggara

Dalam lingkup Asia Tenggara, sebenarnya sudah ada satu kerjasama yang terjalin antara Jepang dengan member-state ASEAN seperti ASEANAPOL, ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) plus Japan, lalu ASEAN *Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC), dan juga ASEAN-Japan *Cybercrime Dialogue* dan juga ASEAN-Japan *Counter Terrorism Dialogue*. Untuk ASEAN-Japan *Counter Terrorism Dialogue* pemimpin-pemimpin yang ada di Asia Tenggara dan Jepang setuju untuk meningkatkan dan mengubah ASEAN-Japan *Counter Terrorism Dialogue* menjadi ASEAN-Japan *Dialogues on Countering Terrorism and Transnational Crime* terkait perubahan pola keamanan di kawasan dan dalam lingkup yang lebih luas yaitu dunia.

Kerjasama-kerjasama yang terjalin pada beberapa waktu terakhir sebenarnya didasari pada kerjasama yang sudah ada sebelumnya yaitu sebelumnya yaitu ASEAN-Japan *Joint Declaration for Cooperation in the Fight against International Terrorism* tahun 2004 yang butuh untuk diperbaharui karena perbedaan pola terorisme pada era modern ini yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan pola terorisme pada masa lalu. Kemudian pada 2015, ada kerjasama baru yang terbentuk antar negara ASEAN yaitu *Manila Declaration to Counter The Rise of Radicalisation and Violent Extremism* yang ditandatangani pada 2017 dalam ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) ke-11 yang didasari pada *Kuala Lumpur Declaration in*

Combating Transnational Crime yang ditandatangani pada 2015 dalam rangka implementasi program ASEAN *Plan of Action in Combating Transnational Crime 2016-2025*.

3.4.3. *Proactive Contribution to Peace*: Program Baru dan Visi Jepang Demi Stabilitas Kawasan

Pada 2013, Jepang mengeluarkan dua dokumen penting, yaitu Strategi Nasional Jepang yang pertama dan melakukan pembaharuan terhadap NDPGnya. Hal ini diakibatkan karena Jepang merasa terancam pada apa yang ada disekitarnya sehingga mereka membutuhkan satu pedoman baru yang dianggap mampu untuk setidaknya melindungi Jepang dalam melaksanakan tujuan nasionalnya. Kemudian atas dasar ini, munculah istilah *Proactive Contribution to Peace*. Tentu saja, Jepang tidak dapat berjalan sendirian untuk dapat menciptakan stabilitas kawasan dan stabilitas dunia.

Dibawah NDPG yang baru, Jepang berencana untuk memperkuat daya gempur dan meningkatkan pertahanannya dalam baik segi jumlah dan kualitas dalam alutsista yang dimiliki di *Japan Air Self-Defense Force (JASDF)*, *Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF)*, dan juga *Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF)*. Menurut rincian anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah, anggaran pertahanan Jepang pada 2017 juga meningkat 1,3 persen menjadi ¥ 5,19 triliun atau sekitar \$45,76 Miliar (Reuters, 2017) dibandingkan tahun anggaran sebelumnya yang hanya ¥ 5.05 triliun atau setara \$41.4 miliar (The Diplomat, 2016). Pengeluaran terbesar mereka adalah untuk menangkal kemungkinan serangan rudal balistik Korea Utara. Selain itu, mayoritas dari anggaran ini digunakan untuk membeli alutsista buatan Amerika Serikat yang bertujuan untuk mendorong industri pertahanan lokal seperti *Mitsubishi Heavy Industries* dan *Kawasaki*

Heavy Industries untuk meningkatkan kualitas industri pertahanannya.

3.4.3.1. Munculnya Permasalahan dalam Berperannya JSDF dan Konflik Antar Kelompok Terkait Hal Ini

Sebenarnya, pengiriman SDF mulai dilakukan ketika konflik berkecamuk di Kamboja dan Timor-Timur. Sedangkan pengiriman SDF ke Irak, menurut beberapa kalangan berkaitan erat dengan hubungan politik Jepang dengan Amerika Serikat. Pengiriman SDF lewat PKO di Kamboja dan Timor-Timur dilaksanakan atas kontribusi dengan PBB. Namun, pengiriman SDF ke Irak lebih dilakukan dalam kontribusi yang berkaitan dengan hubungan bilateral antara Jepang-AS. Sebagian pengamat politik menganggap bahwa hal tersebut dilakukan Jepang karena adanya kelemahan politik Jepang dalam mengambil sikap. Sebagian lagi menganggap bahwa pilihan tersebut adalah jalan terbaik yang harus dilalui Jepang.

Permasalahan pada pasal 9 Konstitusi 1947 ini juga dipengaruhi oleh pemikiran tiga kelompok di Jepang (Sjamsumar, 2005). Pertama, berasal dari kelompok realis–militer, yang berpendapat bahwa Jepang harusnya memperoleh tanggung jawab militer yang lebih besar dalam isu pertahanan. Selain itu, *Self Defense Force* (SDF) Jepang harus meningkatkan kemampuan komando, kontrol, komunikasi serta militer. Kedua, kelompok yang berpandangan nasionalis murni yang berpendapat bahwa Jepang seharusnya berdiri secara mandiri dan lepas dari Amerika Serikat

dan membentuk pertahanannya sendiri. Selain itu, Jepang harus mampu untuk lebih mandiri dalam pengembangan kemampuan militernya. Ketiga, ialah kelompok yang berpandangan pasifis, yang menganggap bahwa Jepang seharusnya lebih proaktif dalam menciptakan perdamaian dunia dengan cara bekerjasama dengan PBB serta mengakhiri hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat. Kelompok ini mendukung konstitusi 1947, terutama pada Pasal 9 dan berpandangan bahwa Jepang seharusnya mengurangi kemampuan militernya agar dapat hidup lebih damai. Perbedaan pemikiran tersebut cukup memberikan suatu dampak bagi dinamika amandemen Pasal 9. Tetapi kecenderungan untuk mengamandemen Pasal 9 masih menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan parlemen Jepang yang secara tidak langsung masih berpandangan seperti kelompok pertama dan kelompok yang kedua.

Dengan demikian, dalam beberapa waktu terakhir Jepang menghadapi berbagai kesulitan untuk mengambil sikap pada berbagai kebijakan yang terkait dengan politik internasional. Keberadaan pasal tersebut mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat Jepang sebagai pengakuan Jepang atas kesalahan yang mereka lakukan pada masa perang dunia II. Keberadaan konstitusi tersebut sekarang telah menjadi satu hal yang cukup membelenggu dan membatasi pergerakan Jepang dalam membangun kapasitas militernya, terutama keinginan untuk berkontribusi dalam pasukan penjaga perdamaian PBB.

3.4.3.2. Tantangan Kaum Progresif atas Kecenderungan Politik Parlemen

Namun, masalah amandemen pasal 9 ini masih mendapat tantangan dari kelompok kiri/kaum progresif terutama partai oposisi seperti DPJ dan partai komunis Jepang. Mereka menganggap bahwa segala bentuk dan upaya Jepang untuk terlibat dalam pengiriman pasukan merupakan tindakan yang berlawanan dengan pasal 9. Hal ini akan memberikan eksese bagi bangkitnya kembali militerisme Jepang dalam politik luar negerinya dan dikhawatirkan sikap “suka perang” akan muncul kembali yang malah akan menimbulkan ketegangan baik dikawasan maupun internasional atas sikap Jepang tersebut. Oleh karena itu, tak heran ketika DPJ memenangkan pemilu dalam pemilihan Majelis Tinggi pada 2007, menolak adanya perpanjangan undang-undang anti-terorisme yang berakhir pada 1 November 2007 tersebut. Kemenangan DPJ dalam Diet merupakan hal yang langka karena selama hampir lima dekade, Diet dikuasai oleh LDP yang beraliran konservatif. Kemenangan DPJ ini telah memberikan dinamika yang signifikan bagi perjalanan amandemen pasal 9 Konstitusi 1947.

Hal yang penting untuk dilihat bahwa adanya kecenderungan secara politik dari Jepang untuk mengamandemen pasal 9 dalam setiap periode pemerintahan. Hal ini didasarkan pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh LDP sebagai partai yang berkuasa di Diet telah secara tidak langsung menggeser esensi dari pasal 9. Pembentukan SDF, undang-undang

anti-terorisme, hingga penerjunan pasukan dalam misi perdamaian secara eksplisit tidak sesuai dengan klausul pasal 9 tersebut. Hal ini menyebabkan eksistensi pasal 9 masih menjadi suatu dilema bagi Jepang yang dalam prosesnya cenderung untuk diamandemen sebagai sebuah mekanisme untuk menjawab tantangan dan dinamika hubungan internasional kontemporer sekarang.

Seperti yang diungkapkan Hendrajit (2007);

“...apa yang terungkap melalui kebuntuan yang terjadi di parlemen antara LDP dan Partai Demokrat[ik] Jepang sebenarnya hanya sekadar puncak gunung es yang menggambarkan adanya rencana strategis Jepang untuk membangkitkan kembali kekuatan militernya...merevisi pasal 9 dari konstitusi Jepang dengan memperluas cakupan peran militer Jepang...”

Pergolakan antarkelompok dalam menilai pasal 9 telah dimulai ketika Konstitusi 1947 diadopsi oleh Jepang. Pergolakan tersebut telah membawa perdebatan panjang mengenai bagaimana Jepang bisa mempertahankan dan memelihara keamanan dan stabilitas negara ketika pasal 9 telah melarang Jepang untuk membangun kekuatan militernya. Pandangan yang berbeda itu nampaknya mengarah pada dominasi kaum pasifis kala itu yang memang sedang berkuasa. Tak heran jika pada 1950-1980-an, fokus utama Jepang adalah membangun kekuatan ekonomi mereka daripada militer (Cipto, 2006: 182-189). Ini membuktikan bahwa masalah amandemen pasal 9 kurang begitu memiliki

pengaruh signifikan bagi publik Jepang. Terlebih isu perdagangan luar negeri dan pertumbuhan ekonomi menjadi isu bersama untuk membangun Jepang pasca-perang (Reischauer dalam Mas'ood & MacAndrews, 2001: 215).

3.4.4. Sayap-Sayap Teror di Jepang: *Imminent Threat II*

3.4.4.1. Aum Shinrikyo: Teror Gas Sarin

Selain Korea Utara, Jepang juga memiliki ancaman nyata yang berasal dari dalam negaranya. Pada awal dekade 2000-an, terdapat kelompok Aum Shinrikyo yang merupakan salah satu kelompok radikal yang sering meresahkan warga Jepang sendiri karena berbagai teror yang mereka lakukan seperti penculikan, pembunuhan, dan berbagai serangan lain. Aum Shinrikyo, yang memiliki arti kebenaran tertinggi, pertama kali didirikan oleh Shoko Asahara -yang kemudian dieksekusi mati pada pertengahan 2018- menggabungkan aliran Hindu dan Buddha dan juga ajaran Kristen. Asahara mengklaim bahwa ia mampu menghapus dosa manusia dan menahbiskan dirinya sebagai seorang nabi. Banyak dari pengikut aliran ini adalah orang-orang yang merasa tertekan dengan hidupnya dan aliran ini menjanjikan kehidupan yang lebih berarti. Bahkan mereka juga bekerjasama dengan Yakuza. Kelompok ini juga melakukan ekspansi dan merekrut orang yang berasal dari luar Jepang, seperti Montenegro, Jerman, Australia, Taiwan, Sri Lanka Belarus, Rusia, Ukraina, dan Uzbekistan.

Pada 2004, kelompok ini melakukan serangkaian teror dengan menyebarkan gas sarin⁹ ke pemukiman penduduk dan membunuh tujuh orang. Kemudian pada Januari 1995 kelompok ini melepaskan gas sarin di Kota Matsumoto. Serangan teror yang terparah adalah ketika mereka menyerang sistem kereta bawah tanah Tokyo hingga menyebabkan 13 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya terluka dalam lima serangan yang mereka lakukan pada tiga jalur kereta (Marunouchi, Chiyoda, dan Hubiya) yang memiliki jutaan pengguna pada jam padat dengan melepaskan gas sarin didalam kereta. Setelah serangan ini polisi melakukan penangkapan ke properti yang dimiliki kelompok ini dan kemudian menangkap Asahara dan memvonis Asahara hukuman mati pada tahun 2006.

Saat ini masih terdapat ribuan anggota kelompok ini namun polisi masih mengawasi pergerakan mereka secara waspada. Mereka melakukan kegiatannya jauh dari pengawasan publik dan bahkan mereka memiliki kelompok kecil yang bernama *Hikari no Wa* yang didirikan oleh juru bicara Asahara yaitu Fumihiro Joyu.

3.4.4.2. Dr. Hassan Ko Nakata dan Saifullah Ozaki

Dr. Hassan Ko Nakata dan Saifullah Ozaki merupakan dua orang yang dianggap memiliki kaitan dengan ISIS yang merupakan warga Jepang dan warga keturunan Jepang. Dr. Ko Nakata merupakan seorang

⁹ Gas sarin pertama kali dikembangkan oleh Nazi pada Perang Dunia II walau kemudian tidak digunakan dalam perang ini. Sarin berasal dari nama ilmuwan yang berhasil menemukan gas ini yaitu Gerhard Schrader, Ottos Ambors, Gerhard Ritter, dan Hans-Jürgen von der Linde. Gas ini merupakan salah satu gas yang cukup berbahaya jika dihirup oleh manusia. Jika terhirup manusia, dalam hitungan kurang dari satu menit, gas ini akan menyebabkan sesak nafas dan kemudian menyerang sistem syaraf manusia yang dapat berujung dengan kematian.

warga negara Jepang yang meraih gelar Islamic Studies di Universitas Tokyo dan meneruskan studi doktoral dengan mengambil Filosofi Islam di Universitas Kairo. Ia kemudian bergabung ke Fakultas Teologi di Universitas Doshisha. Ia mengaku tertarik untuk mendalami studi tentang Islam pasca-Revolusi Iran¹⁰. Pada Tahun 2015, ia diduga terlibat dalam penangkapan dua warga negara Jepang yang berencana untuk pergi dan bergabung dengan ISIS di Suriah dan Iraq. Ia dianggap memberikan arahan kepada kedua warga Jepang itu untuk bergabung ke ISIS. Namun ia menolak tuduhan itu dan mengatakan bahwa ia tidak lagi mendukung ISIS setelah ia pergi ke Suriah dan gagal untuk melakukan negosiasi pelepasan Haruna Yukawa yang disandera oleh ISIS. Ketika ia kembali ke Jepang, ia mengatakan bahwa ia adalah penengah antara Kementerian Luar Negeri Jepang dan Umar Ghuraba, kelompok ISIS yang berbasis di Suriah Utara

Sementara itu Saifullah Ozaki merupakan warga keturunan Jepang yang lahir di Bangladesh dan merupakan warga negara Bangladesh. Ia menempuh studi di Universitas Ritsumeikan di Prefektur Kyoto dan menempuh studi doktoral pada Studi Asia-Pasifik tahun 2011 di tahun yang sama. Pada 2016, ia dan 10 orang lainnya dianggap terlibat pada serangan Teror di Dhaka pada Juli 2016¹¹. Sewaktu masih tinggal di Jepang, polisi

¹⁰ Revolusi Iran merupakan suatu revolusi yang terjadi pada 7 Januari 1978 hingga 11 Februari 1979 yang berusaha untuk menjatuhkan sistem kerajaan di Iran dibawah Mohammad Reza Shah Pahlevi dan kemudian mengganti sistem pemerintahan Iran dengan sistem Republik Islam dibawah Ayatollah Ruhollah Khomeini yang merupakan pemimpin revolusi.

¹¹ Serangan Teror di Dhaka terjadi pada 1 Juli 2016. Pelaku memasuki Holey Artisan Bakery dengan membawa bom, pistol, dan juga menangkap belasan orang sebagai tawanan. 29 orang tewas termasuk 20 tawanan, 2 polisi, 5 pelaku, dan 2 pegawai dari Holey Artisan Bakery. ISIS

Jepang melakukan pemeriksaan terhadapnya dan memberikan kesimpulan bahwa ia sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok ekstrimis manapun.

mengklaim bahwa mereka melakukan hal ini, namun kemudian dikonfirmasi bahwa pelaku bukan merupakan anggota ISIS namun Jamaat-ul-Mujahideen.